



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DADANG SUNENDAR**
2. Jabatan : **KETUA DGB**
3. NHK : **70560**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 9.789.708.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 39 m2/39 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 282 m2/200 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 228 m2/200 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/67 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 164.708.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 22 m2/22 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah Seluas 430 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA , Rp. 75.000.000
7. Tanah Seluas 1.348 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA , Rp. 250.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/60 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
10. Tanah Seluas 764 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 785.000.000

1. MOBIL, MERCEDES S 350 Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, TOYOTA NEW FORTUNER TRD Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 365.351.200

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.127.987.394

F. HARTA LAINNYA

Rp. 93.460.799

Sub Total

Rp. 12.161.507.393

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 12.161.507.393

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.